



KHUSUS PELANGGAN KORAN

Dapatkan hak Anda untuk menikmati akses tanpa batas konten digital Lampung Post. Segera aktifkan akun lampungpost.id Anda

Customer Service: 0812 1811 4344

Lampung Perketat Bansos 2026

Poin Penting:

1. Penyaluran PKH dan BPNT tahap II dimulai Mei 2026 melalui Himbara dan PT Pos.
2. Sistem desil DTKS jadi acuan utama penerima bansos.
3. Pencoretan penerima dipicu perubahan ekonomi dan validasi data.

Penyaluran PKH dan BPNT tahap II dimulai Mei 2026 melalui Himbara dan PT Pos. Sistem desil DTKS jadi acuan utama penerima bansos. Pencoretan penerima dipicu perubahan ekonomi dan validasi data.

ATIKA OKTARIA S NILAM

atika@lampungpost.co.id

Pemerintah Provinsi Lampung memperketat mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) tahun 2026 guna memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Penyaluran tahap kedua untuk periode Mei 2026 resmi dimulai dengan fokus pada validasi data penerima melalui sistem desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, mengatakan penyaluran bansos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah.

"Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai ketentuan," ujarnya, Rabu (6/5).

Menurutnya, pemerintah kini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memastikan status kepesertaan bansos. Warga diminta rutin melakukan pengecekan mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial untuk mengetahui apakah masih terdaftar sebagai penerima.

Langkah ini dinilai krusial mengingat



■ DOK LAMPUNG POST

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL. Penyaluran bantuan sosial (Bansos) program sembako untuk 15.578 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Pesisir Barat, beberapa waktu yang lalu. Kantor Wilayah DJPb Kementerian Keuangan Lampung mencatat penyaluran bantuan sosial pemerintah pusat mencapai Rp22,96 triliun selama Januari 2020 hingga Oktober 2025. Angka tersebut memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjaga daya beli warga Lampung.

adanya dinamika data yang terus diperbarui. Aswarodi menegaskan, pembaruan data dilakukan untuk menjaga akurasi penerima agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Masyarakat harus aktif mengecek status desil dan kepesertaan bansosnya," kata dia.

Dalam sistem DTKS, pemerintah menggunakan pendekatan desil untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen termiskin, disusul desil 2 (10-20 persen), desil 3 (20-30 persen), dan desil 4 (30-40 persen).

Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bansos karena dinilai paling rentan secara ekonomi. Dengan sistem ini, pemerintah ber-

harap distribusi bantuan menjadi lebih adil dan terukur.

Namun demikian, perubahan status penerima kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Aswarodi mengakui pihaknya menerima banyak laporan terkait pencoretan nama dari daftar penerima bansos.

Ia menjelaskan, pencoretan tersebut bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama adalah peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria penerima.

Selain itu, keberadaan anggota keluarga yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri dalam satu kartu keluarga juga menjadi penyebab gugurnya status penerima bansos.

"Data administrasi yang tidak sinkron juga sering menjadi kendala. Misalnya perbedaan data KTP dengan data Duk-

capil," ujarnya.

Faktor lain yang memengaruhi pencoretan adalah kondisi penerima yang telah meninggal dunia tanpa ahli waris dalam satu kartu keluarga, serta hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian kondisi ekonomi.

Tepat Sasaran

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bansos.

"Ini bukan untuk mengurangi bantuan, tetapi memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak," tegasnya.

Penyaluran bansos tahap kedua ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan. Pemerintah juga terus mendorong transparansi dalam pengelolaan data agar masyarakat dapat memantau secara langsung status bantuan mereka.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga akurasi data. Warga diminta segera melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian data melalui pemerintah desa atau dinas terkait.

Jika terjadi kendala dalam pencairan bantuan melalui bank Himbara atau Kantor Pos, masyarakat juga diimbau untuk berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.

Dengan sistem yang semakin diperketat, Pemerintah Provinsi Lampung optimis penyaluran bansos 2026 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

"Ke depan, kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan akurat," pungkas Aswarodi. (R2)

BI Dorong UMKM Halal

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lampung mendorong pelaku UMKM untuk menguasai pangsa pasar halal lifestyle yang dinilai memiliki potensi besar, namun belum tergarap optimal.

Ekonomi | Hlm 2

Dengan pengelolaan yang tepat, MBG dapat menjadi titik awal bagi transformasi ekonomi Lampung yang lebih berkelanjutan.

Tajuk | Hlm 5

“Kepala desa harus menjadi *role model*, mampu menghadirkan solusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.”



Rahmat Mirzani Djausal
Gubernur Lampung

Ragam | Hlm 7

Teror Harimau Resahkan Warga Lemong

Kasus dugaan serangan harimau di Lemong menunjukkan meningkatnya potensi konflik manusia dan satwa liar.

Daerah | Hlm 6

Lampung Kejar Peningkatan Mutu Pendidikan

Aksi mahasiswa menjadi katalis percepatan reformasi pendidikan di Lampung dengan Pemerintah Kota bandar Lampung, provinsi, dan DPRD menunjukkan komitmen kuat melakukan perbaikan.

Pendidikan | Hlm 7

LAMPUNG PERKETAT BANSOS 2026
Penyaluran bansos diperketat agar lebih tepat sasaran

Sumber: Data Pemberitaan

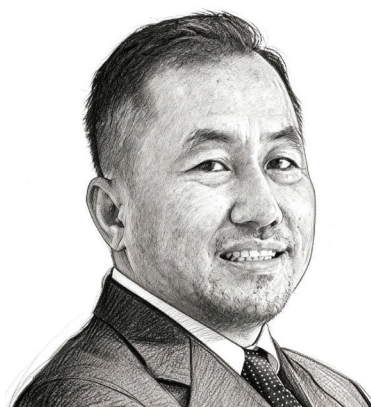
Pemprov Lampung memperketat mekanisme penyaluran bantuan sosial tahun 2026 dengan fokus pada validasi data penerima melalui sistem desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- 1 PENYALURAN TAHAP II DIMULAI**
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL (BANSOS) Tahap II dimulai Mei 2026 resmi dimulai.
JENIS BANTUAN:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
DISALURKAN MELALUI:
BRI, mandiri, BNI, BTN, POS INDONESIA
- 2 SISTEM BARU: DESIL DTKS**
Penerima diprioritaskan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
DESIL 1: 10% Termiskin
DESIL 2: 10-20%
DESIL 3: 20-30%
DESIL 4: 30-40%
Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bansos.
- 3 PENYEBAB NAMA DICORET**
Kondisi ekonomi keluarga membaik
Ada ASN, TNI, atau Polri dalam satu kartu keluarga
Data KTP dan Dukcapil tidak akurat
Penerima meninggal dunia tanpa ahli waris dalam satu kartu keluarga
Hasil verifikasi lapangan tidak sesuai kondisi ekonomi
- 4 PEMERINTAH TEKANKAN**
Bantuan harus tepat sasaran.
Data penerima terus diperbarui untuk menjaga akurasi.
Warga wajib aktif mengecek status kepesertaan bansos.
Transparansi dan akurasi data diperkuat.
- 5 CARA CEK STATUS BANSOS**
Melalui laman resmi Kementerian Sosial: cek.bansos.kemensos.go.id
KOORDINASI MELALUI:
Pemerintah Desa, Pendamping Sosial, Dinas Sosial terkait
Jika ada kendala pencairan bantuan, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.
- 6 TARGET PEMPROV LAMPUNG**
Tidak ada bansos salah sasaran.
Data lebih valid dan akurat.
Penyaluran lebih cepat.
Perlindungan sosial lebih adil dan terukur.

“Ini bukan untuk mengurangi bantuan, tetapi memastikan bantuan diterima oleh yang benar-benar berhak.”
- Aswarodi
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

OPINI

Ketika Harga Plastik Mahal, Shrinkflation Menjadi Jalan Pintas Industri



Dr. Antoni Ludfi Arifi, S.E., M.M.
Associate Professor Institut STIAM I & Perhati perlindungan Konsumen

LONJAKAN harga bahan baku plastik kini tidak lagi sekadar dipandang sebagai dinamika industri semata, melainkan telah menjadi alarm keras yang mengancam ketahanan ekonomi

sehari-hari. Ketika biaya kemasan membengkak hingga melampaui nilai isi produk, keseimbangan logika pasar pun mulai bergeser secara tidak sehat. Pelaku usaha pun terdorong mengambil jalan pintas yang licin: menyusutkan isi tanpa menyentuh harga. Praktik ini bukan hanya menciptakan ilusi nilai di mata konsumen, tetapi juga secara perlahan menggerogoti daya beli sekaligus merusak kepercayaan public yang selama ini menjadi fondasi hubungan antara produsen dan konsumen.

Lonjakan harga bahan baku plastik tidak hanya berhenti sebagai persoalan struktural di tingkat industri, tetapi telah menjelma menjadi bom waktu yang langsung dirasakan konsumen. Di balik kemasan yang tampak "sama", isi produk diam-diam menyusut. Fenomena ini dikenal sebagai shrinkflation, praktik yang secara halus menggeser beban inflasi ke pundak konsumen

tanpa mereka sadari. Ketika harga plastik naik, produsen tidak selalu menaikkan harga jual secara eksplisit, melainkan mengurangi isi produk agar margin tetap terjaga dalam tekanan biaya yang semakin tinggi.

Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kini semakin masif akibat tekanan rantai pasok global dan kenaikan biaya produksi. Dalam praktiknya, perusahaan lebih cenderung memilih strategi pengurangan ukuran produk dibanding menaikkan harga secara langsung, karena respons psikologis konsumen terhadap kenaikan harga jauh lebih sensitif dibanding perubahan ukuran. Ini artinya, konsumen sering tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya membayar lebih mahal per unit tanpa adanya peningkatan nilai yang sepadan.

Yang lebih problematik, praktik ini seringkali tidak transparan. Banyak konsumen merasa teripu karena perubahan dilakukan secara halus

melalui desain kemasan baru atau narasi pemasaran yang menyesatkan. Dalam perspektif etika bisnis, praktik ini dianggap berpotensi merusak kepercayaan jangka panjang terhadap merek. Dengan demikian, shrinkflation menjadi penegas bahwa inflasi modern tidak selalu tampak dalam angka harga, melainkan juga beroperasi dalam dimensi tersembunyi berupa kuantitas. Ketika daya beli masyarakat ditekan secara tidak kasat mata, dampaknya jauh lebih dalam karena merusak persepsi nilai dan kepercayaan yang seharusnya dijaga oleh pelaku usaha secara bertanggung jawab.

Ekonomi yang Tidak Jujur: Siapa yang Diuntungkan?

Dalam logika ekonomi, perusahaan menghadapi dilema: menaikkan harga dan berisiko kehilangan pelanggan, atau mengurangi ukuran

produk dan mempertahankan harga. Banyak yang memilih opsi kedua karena dianggap lebih "aman secara psikologis". Model ekonomi menunjukkan bahwa dalam kondisi kenaikan biaya produksi, perusahaan akan menurunkan kuantitas produk sambil meningkatkan harga per unit secara implisit sebagai bentuk penyesuaian yang tidak selalu disadari konsumen.

Masalahnya, strategi ini semakin efektif ketika konsumen tidak memperhatikan detail ukuran. Kelompok konsumen yang "tidak sadar" menjadi sasaran empuk, sehingga perusahaan dapat mempertahankan keuntungan tanpa resistensi pasar. Bahkan, semakin tinggi tingkat ketidaksadaran konsumen, semakin besar ruang bagi praktik shrinkflation untuk berkembang dan semakin signifikan pula dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan. (Bersambung ke Hlmn. 4)

BI Dorong UMKM Halal

Poin Penting :

1. BI dorong UMKM masuk pasar halal lifestyle melalui sertifikasi halal.
2. Lampung Sharia Economic Festival digelar 8—10 Mei 2026.
3. Pertumbuhan ekonomi Lampung diproyeksi 5,0—5,6 persen.

Penguatan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi mendorong pertumbuhan inklusif di Lampung. Melalui festival dan pendampingan UMKM, Bank Indonesia menargetkan daerah ini menjadi pemain utama halal lifestyle di Sumatra.

DELIMA NATALIA NAPITUPULU
delima@lampungpost.co.id

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menguasai pangsa pasar halal lifestyle yang dinilai memiliki potensi besar, namun belum tergarap optimal.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Lampung Sharia Economic Festival yang akan digelar pada 8—10 Mei 2026 di Lampung City Mall. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatra 2026.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Achmad P. Subarkah, mengatakan tren halal lifestyle kini berkembang pesat dan menjadi peluang strategis bagi pelaku usaha lokal.

“Halal lifestyle bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan konsumen. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan UMKM,” ujarnya, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurutnya, salah satu kunci agar UMKM mampu bersaing di pasar tersebut adalah kepemilikan sertifikasi halal. Bank Indonesia terus melakukan pendampingan agar pelaku usaha dapat memenuhi standar tersebut.

“Kami dorong UMKM untuk memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Ini menjadi nilai tambah sekaligus kepercayaan bagi konsumen,” katanya.

Selain itu, BI juga menyoroti keterbatasan jumlah juru sembelih halal di Lampung. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu hambatan dalam memastikan kualitas produk halal, khususnya di sektor pangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, BI memfasilitasi program sertifikasi juru sembelih halal guna menjamin standar dan kualitas produk daging di masyarakat.

“Jumlahnya masih minim. Kami fasilitasi sertifikasi agar rantai pasok halal bisa terjaga,” ujar Subarkah.

Dalam pelaksanaannya, Lampung Sharia Economic Festival mengusung tiga pilar utama,

yakni perluasan rantai nilai halal, penguatan pembiayaan syariah, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap gaya hidup halal.

Melalui kegiatan ini, BI berharap terbangun sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah.

“Kami ingin Lampung menjadi salah satu pemain utama ekonomi syariah di Sumatra,” kata Subarkah.

Tetap Tumbuh

Di sisi lain, Bank Indonesia optimis tren pertumbuhan ekonomi Lampung tetap terjaga hingga akhir 2026. Pertumbuhan diproyeksikan berada pada kisaran 5,0 hingga 5,6 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Bimo Epyanto, menyebutkan pertumbuhan tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang kuat serta kinerja sektor unggulan yang stabil.

“Pertumbuhan ekonomi Lampung kami perkirakan tetap kuat di kisaran 5,0 sampai 5,6 persen,” ujarnya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi fondasi utama ekonomi daerah. Selain itu, sektor industri pengolahan serta perdagangan juga menunjukkan peningkatan kinerja.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, BI menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, penguatan sektor primer melalui peningkatan produktivitas dan integrasi hulu-hilir komoditas.

Kedua, mendorong hilirisasi dan investasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah. Ketiga, mempercepat digitalisasi keuangan guna memperluas akses layanan keuangan masyarakat. (R2)



JELASKAN KE WARTAWAN. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menjelaskan kondisi ekonomi Lampung ke wartawan.

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Jln. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir, Sukadana, Kode Pos 34194.
Telp/Fax (0725) 625363 e-mail : kab-lampung@atrbn.go.id

PENGUMUMAN
(Tentang Sertipikat Hilang)
Nomor : 6,7/DI.304-08.10/IV/2026

Untuk mendapatkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang hilang, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nama / Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah a. Jenis Hak b. Nomor Hak c. Luas	NIB	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Jalan b. Desa/Kel c. Kecamatan	Keterangan
1	PONISIH Desa Braja Caka, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur	a. Hak Milik b. NIB (el) 08.10.00001 3842.0 c. 2.403 M ²	13842	PONISIH Tanggal Lahir: 18-04-1979	14-11-2025	-Nibung -Gunung Pelindung	-Berdasarkan Surat Pernyataan Sumpah/Teguh Tgt: 27 April 2026 -Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan Nomor: STPL/31/CI/IV/2026/SPKT POLSEK GUNUNG PELINDUNG/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG tanggal 23 April 2026
2	PONISIH Desa Braja Caka, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur	a. Hak Milik b. NIB (el) 08.10.00001 3843.0 c. 2.398 M ²	13843	PONISIH Tanggal Lahir: 18-04-1979	14-11-2025	-Nibung -Gunung Pelindung	-Berdasarkan Surat Pernyataan Sumpah/Teguh Tgt: 27 April 2026 -Surat Keterangan Tanda Lapur Kehilangan Nomor: STPL/28/CI/IV/2026/SPKT POLSEK GUNUNG PELINDUNG/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG tanggal 13 April 2026

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap Permohonan Pengganti tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

SUKADANA, 30 April 2026
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MURNIAWAR, S. T., MURP
NIP. 197802132008041001

LAMPUNG POST
A Part of

Kami menerima materi digital anda

Hubungi : 0721-783715

Format warna/Color: CMYK
Support File: CorelDraw, Photoshop, Illustrator, InDesign, PPT, PDF, Word, Excel

PARIWARA
089521767787 (Ica)
081379144886 (Sulaiman)

KEHILANGAN

STNK BE 1426 CP, NK. MHKV5EA2J-HK019740, NS. INRF259613, AN. ANGA ANDIKA

BPKB BE 2595 ANT, NK. MH1K-C12169K174615, NS. KC12E1174461, AN. DWI ISMAYATI

BPKB BE 8559 AI, NOKA:MH-YESL4156J189166, NOSIN:G15AIA188923, AN:MASIDIK

BPKB BE 3267 AT, NOKA:MH1JFS-118FK211802, NOSIN:JFS1E1209637, AN:RINTA SURI

oneClick
LAMPUNG POST
A Part of

GET IT ON Google Play

PT JUJUNDO PERKASA

• 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan luas total 236 m² berikut bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung (sesuai keterangan pada SHM) atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tulang Bawang No. 3, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dh. Tanjungkarang Pusat), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sesuai dengan SHM No. 1209/E an. HENDRIK EFFENDI dengan luas tanah 125 m² dan di Desa Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota T. Karang - T. Betung, Propinsi Lampung (sesuai keterangan pada SHM) atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tulang Bawang No. 3, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dh. Tanjungkarang Barat), Kota Bandar Lampung (dh. T. Karang - T. Betung), Provinsi Lampung sesuai dengan SHM No. 137/E an. Hendrik Effendi dengan luas tanah 111 m², di jual satu paket :
(Harga Limit Rp. 3.400.000.000,- uang jaminan Rp. 680.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :
Cara Penawaran : Terbuka (Open Bidding)
Hari / Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain Lelang : lelang.go.id
Tempat : KPKNL Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung

Penetapan Pememen : Setelah batas akhir penawaran

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Ruang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap-subungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is).
5. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangkan besaran uang jaminan.
8. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
10. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka Peserta Lelang baik yang telah belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak dipertanggungjawabkan meluncur tuntas apapun baik Pidana ataupun Perdata kepada Pejabat Lelang / KPKNL Bandar Lampung / PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery 03.
11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB pada Kementerian Keuangan.
12. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.41 Tahun 2023, kepada pemenang lelang diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pengenaan tarif sebesar 10% x 11% x Harga Jual Agunan, tarif PPN tersebut wajib disetorkan kepada PNI (sebagai wajib pajak) pada hari yang sama dengan pembayaran pelunasan lelang pada butir 11 di atas. Pelunasan pembayaran PPN ini merupakan salah satu persyaratan untuk pengembalian sertifikat objek lelang berikut surat ruyanya.
13. Informasi selanjutnya hubungi Seksi Sertipikat Lelang KPKNL Bandar Lampung. Telpun 0721-474735 / PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery 03 - Unit Lampung, Jl. Kartini No. 51, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, dengan Sdr. Media (HP:08195866397) atau Sdr. Pipen (HP:081808183637).

Palembang, 07 Mei 2026
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Retail Collection & Recovery
Mitra Setia
Head of RCR Regional 03

APARTEMEN DIJUAL

Speck Apartemen :

Kawasan : Springhill Condotel Lampung
Type : Emerald (1 BR-Apartment)
View : Sea View
Perkiraan Luas Nett : ± 40.5 M²
Lantai : Lt. 15
Unit No : 1509A

Minat Hub JUNIANTO
(0853-6984-4171)

**Atau Telp :
(0721) 783693
Ext 1026**

RUMAH DIJUAL

Tampak Depan Jl. Putri Balau

Speck Rumah :

- Rumah 2 Lantai
- Dapur
- Luas Tanah 330 M² dan
- Ruang Cuci
- Luas Bangunan 150 M²
- 4 Kamar Tidur
- Ruang Tamu
- Car Port Halaman Depan
- Ruang Keluarga
- Belakang
- Ruang Makan
- Gudang
- 2 Kamar Mandi

Lokasi : Jl. Putri Balau/Hayam Wuruk tembus Jl. Rajawali No 2, Bandar Lampung.

Harga : 1,5 Miliar

Minat Hub JUNIANTO (0853-6984-4171)
Atau Telp : (0721) 783693 Ext 1026

APARTEMEN DIJUAL

Speck Apartemen :

Kawasan : Springhill Condotel Lampung
Type : Emerald (1 BR-Apartment)
View : Sea View
Perkiraan Luas Nett : ± 40.5 M²
Lantai : Lt. 15
Unit No : 1509A

Minat Hub JUNIANTO
(0853-6984-4171)

**Atau Telp :
(0721) 783693
Ext 1026**

RUMAH DIJUAL

Tampak Depan Jl. Putri Balau

Speck Rumah :

- Rumah 2 Lantai
- Dapur
- Luas Tanah 330 M² dan
- Ruang Cuci
- Luas Bangunan 150 M²
- 4 Kamar Tidur
- Ruang Tamu
- Car Port Halaman Depan
- Ruang Keluarga
- Belakang
- Ruang Makan
- Gudang
- 2 Kamar Mandi

Lokasi : Jl. Putri Balau/Hayam Wuruk tembus Jl. Rajawali No 2, Bandar Lampung.

Harga : 1,5 Miliar

Minat Hub JUNIANTO (0853-6984-4171)
Atau Telp : (0721) 783693 Ext 1026

PENGUMUMAN II (KEDUA)
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 dan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang berkepada "Bumi Kandang Berdasarkan Setoran Uang Muka Sisa", PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery 03, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek jaminan hutang sebagai berikut:

PT JUJUNDO PERKASA

• 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan luas total 236 m² berikut bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung (sesuai keterangan pada SHM) atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tulang Bawang No. 3, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dh. Tanjungkarang Pusat), Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sesuai dengan SHM No. 1209/E an. HENDRIK EFFENDI dengan luas tanah 125 m² dan di Desa Enggal, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota T. Karang - T. Betung, Propinsi Lampung (sesuai keterangan pada SHM) atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Tulang Bawang No. 3, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal (dh. Tanjungkarang Barat), Kota Bandar Lampung (dh. T. Karang - T. Betung), Provinsi Lampung sesuai dengan SHM No. 137/E an. Hendrik Effendi dengan luas tanah 111 m², di jual satu paket :
(Harga Limit Rp. 3.400.000.000,- uang jaminan Rp. 680.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :
Cara Penawaran : Terbuka (Open Bidding)
Hari / Tanggal : Kamis, 21 Mei 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain Lelang : lelang.go.id
Tempat : KPKNL Bandar Lampung, Jl. Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung

Penetapan Pememen : Setelah batas akhir penawaran

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat di atas.
3. Ruang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is), dan dapat dilihat di alamat objek lelang berada sejak Pengumuman ini diumumkan.
4. Peserta lelang dianggap-subungguh telah mengetahui, menyetujui dan menerima ketentuan dan syarat-syarat lelang serta kondisi objek lelang apa adanya (as is).
5. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. Jumlah nominal uang jaminan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan sesuai pengumuman lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandar Lampung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/Transfer/Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangkan besaran uang jaminan.
8. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening Peserta Lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
9. Apabila tanah/bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni/dimanfaatkan oleh pihak manapun, maka pengosongan objek lelang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
10. Apabila pelaksanaan lelang **DIBATALKAN** (lelang dapat dibatalkan paling lambat sesaat sebelum dimulai), maka Peserta Lelang baik yang telah belum menyetor uang jaminan penawaran lelang tidak dipertanggungjawabkan meluncur tuntas apapun baik Pidana ataupun Perdata kepada Pejabat Lelang / KPKNL Bandar Lampung / PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery 03.
11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan yang telah disetorkan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB pada Kementerian Keuangan.
12. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.41 Tahun 2023, kepada pemenang lelang diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pengenaan tarif sebesar 10% x 11% x Harga Jual Agunan, tarif PPN tersebut wajib disetorkan kepada PNI (sebagai wajib pajak) pada hari yang sama dengan pembayaran pelunasan lelang pada butir 11 di atas. Pelunasan pembayaran PPN ini merupakan salah satu persyaratan untuk pengembalian sertifikat objek lelang berikut surat ruyanya.
13. Informasi selanjutnya hubungi Seksi Sertipikat Lelang KPKNL Bandar Lampung. Telpun 0721-474735 / PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery 03 - Unit Lampung, Jl. Kartini No. 51, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, dengan Sdr. Media (HP:08195866397) atau Sdr. Pipen (HP:081808183637).

Palembang, 07 Mei 2026
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Retail Collection & Recovery
Mitra Setia
Head of RCR Regional 03

LAMPUNG POST
A Part of

KAMI HADIR DENGAN PAKET BERLANGGANAN TERBARU

KORAN & LAMPUNG POST DIGITAL PREMIUM

Rp 120.000/Bulan

Dapatkan Keuntungan Paket Berlangganan Terbaru:

- Koran dikirim ke alamat
- Akses web paper & epaper
- Edisi digital tanpa gangguan iklan
- Edisi digital hadir lebih pagi
- Tambahan 4 halaman epaper
- Dilengkapi update berita terkini
- Ribuan arsip epaper
- Dapat diakses di semua gadget

Tetaplah Menjadi Bagian dalam Mendukung LAMPUNG POST Menghadirkan Jurnalisme Berkualitas dan Konvergensi, serta Ramah Lingkungan untuk Masa Depan Bumi yang Lebih Baik.

Media Multiplatform Lampung Post:

DAPATKAN HAK ANDA UNTUK AKSES KORAN DIGITAL LAMPUNG POST

SEGERA HUBUNGI AGEN KAMI ATAU NOMOR KONTAK BERIKUT
0812-1811-4344
Berlaku khusus pelanggan bulanan

Korupsi Bawaslu Disorot



■ LAMPUNG POST/DOK

KORUPSI BAWASLU. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengungkapkan dua tersangka tersebut berinisial S selaku Koordinator Sekretariat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta OS sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Poin penting:

1. Dua tersangka ditetapkan, kerugian negara capai Rp814 juta.
2. Modus: kegiatan fiktif, dokumen palsu, dan penyalahgunaan anggaran.
3. Akademisi dorong penyidikan diperluas hingga komisioner.

Penanganan dugaan korupsi anggaran Bawaslu Tulangbawang memasuki babak baru. Selain penetapan tersangka, publik mendesak aparat penegak hukum mengusut lebih dalam hingga kemungkinan keterlibatan unsur pimpinan.

ASRUL SEPTIAN MALIK
asrul@lampungpost.co.id

PENANGANAN perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulangbawang terus menjadi perhatian publik. Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat telah menetapkan dua tersangka, namun desakan agar penyidikan diperluas terus menguat.

Kepala Kejaksaan Negeri Tulangbawang melalui Kasi Intelijen, Dimas Tryanda Sany,

mengungkapkan dua tersangka tersebut berinisial S selaku Koordinator Sekretariat sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta OS sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan ekspose perkara dan menemukan cukup bukti,” ujarnya, Selasa (5/5).

Berdasarkan hasil audit, dugaan penyimpangan anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2023–2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp814.267.377.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal

603 juncto Pasal 20 KUHP serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001.

Penyidik juga telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 4 Mei hingga 23 Mei 2026. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan objektif dan subjektif, termasuk kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

“Selama pemeriksaan, tersangka tidak kooperatif dan diduga memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta,” kata Dimas.

Dalam pengungkapan kasus ini, kejaksaan membeberkan sejumlah modus yang digunakan tersangka dalam mengelola anggaran. Di antaranya pencairan dana tanpa dokumen pertanggungjawaban yang sah, penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, hingga pembuatan kegiatan fiktif.

Selain itu, ditemukan pula dokumen yang diduga direkayasa untuk mendukung laporan pertanggungjawaban. Praktik tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2023 hingga 2024.

“Sebagian kegiatan yang dilaporkan ternyata tidak pernah dilaksanakan,” ujar Dimas.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya

pengawasan internal serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.

Dorongan Usut Keterlibatan Struktural

Di tengah proses hukum yang berjalan, kalangan akademisi menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaku teknis semata. Akademisi hukum Universitas Tulang Bawang, Ahadi Fajrin Prasetya, menegaskan pentingnya menelusuri rantai tanggung jawab hingga level pengambilan kebijakan.

“Dalam perkara korupsi, harus dilihat siapa yang memberi perintah, mengetahui, atau bahkan menikmati hasilnya,” ujarnya.

Menurut dia, struktur kelembagaan Bawaslu menempatkan komisioner sebagai pengambil kebijakan, sementara sekretariat hanya menjalankan fungsi teknis. Oleh karena itu, kemungkinan keterlibatan unsur komisioner perlu didalami secara komprehensif.

Desakan ini semakin menguat jika dibandingkan dengan kasus serupa di Kabupaten Mesuji. Dalam perkara tersebut, hanya Ketua Bawaslu yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa menyentuh unsur sekretariat, termasuk PPK, meski memiliki peran strategis dalam pengelolaan anggaran.

“Ini menjadi pertanyaan publik. Dua

perkara dengan karakteristik serupa, tetapi konstruksi tersangkanya berbeda,” ujarnya.

Perbedaan penanganan ini dinilai berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan jika tidak dijelaskan secara transparan oleh aparat penegak hukum.

Perbandingan antara kasus Tulang Bawang dan Mesuji menjadi penting dalam menguji konsistensi penegakan hukum. Jika pola perkara serupa, maka pendekatan hukum yang digunakan seharusnya tidak jauh berbeda.

Kejaksaan diharapkan tidak hanya fokus pada pembuktian formil, tetapi juga menggali peran setiap pihak dalam rantai pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif, transparan, dan menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Publik kini menanti langkah lanjutan dari Kejari Tulang Bawang. Apakah penyidikan akan berkembang hingga mengungkap aktor intelektual di balik dugaan korupsi tersebut, atau berhenti pada pelaku teknis.

Yang jelas, pengungkapan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dalam memberantas korupsi secara menyeluruh, tidak tebang pilih, serta mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. (R2)

Tuntutan 4 Tahun untuk GM, Kasus Gelap Dana Rp12,9 Miliar Bergulir

PERKARA dugaan penggelapan dana perusahaan senilai Rp12,9 miliar yang menjerat Teddy Chandra (39) memasuki babak tuntutan. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Rabu (6/5), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana empat tahun penjara.

Teddy yang merupakan warga Tanjungkarang diketahui menjabat sebagai General Manager (GM) sekaligus mengelola keuangan di PT Mitra Mekar Mandiri, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan suku cadang kendaraan. Dalam dakwaan, terdakwa disebut melakukan penggelapan dana perusahaan secara bertahap sejak 2019 hingga akhir 2025.

JPU Chandrawati menyatakan perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa dijerat Pasal 374 KUHP yang pengacuannya telah disesuaikan dengan Pasal 488 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp200 juta. Dalam tuntutanannya, JPU menegaskan apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita dan dilelang.

“Jika penyitaan tidak mencukupi atau tidak memungkinkan, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim.

Dalam pertimbangannya, jaksa menguraikan sejumlah hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa dinilai merugikan perusahaan tempatnya bekerja, mengganggu stabilitas keuangan, serta berdampak pada keberlangsungan operasional usaha. Selain itu, hingga

saat ini belum ada upaya perdamaian antara terdakwa dan pihak perusahaan.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa dinilai bersikap kooperatif selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Usai pembacaan tuntutan, terdakwa langsung menyampaikan pembelaan (pleidoi) secara lisan di hadapan majelis hakim. Dengan nada lirih, ia memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga.

“Saya masih punya anak yang masih sekolah dasar dan keluarga yang harus saya tanggung,” ujarnya.

Di sisi lain, pihak perusahaan melalui kuasa hukumnya, Mat Arsan, menyatakan keberatan atas tuntutan yang dinilai belum mencerminkan besarnya kerugian yang dialami.

“Kami menghormati tuntutan jaksa, namun berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis maksimal,” katanya usai persidangan.

Menurutnya, tindakan terdakwa telah menimbulkan dampak serius terhadap kondisi perusahaan. Selain kerugian finansial yang besar, stabilitas usaha juga terganggu, termasuk terhadap para pekerja yang bergantung pada penghidupan di perusahaan tersebut.

Ia menilai perbuatan terdakwa masuk dalam kategori kejahatan kerah putih (white collar crime) yang dilakukan secara terencana dan sistematis.

Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan pejabat internal perusahaan dengan kewenangan luas dalam pengelolaan keuan-

gan. Penyalahgunaan kepercayaan dalam jabatan dinilai memiliki dampak signifikan, tidak hanya terhadap perusahaan, tetapi juga terhadap ekosistem usaha secara keseluruhan.

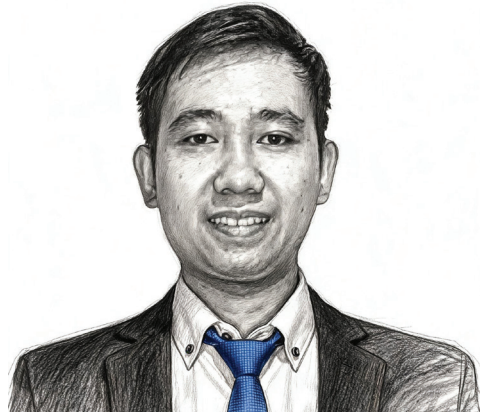
Majelis hakim dijadwalkan melanjutkan persidangan dengan agenda putusan dalam waktu dekat. Putusan tersebut akan menjadi penentu akhir atas perkara yang telah bergulir sejak awal tahun ini. (RUL/R2)



■ MEDCOM.ID/DOK

KASUS PENGELAPAN. Terdakwa Teddy Candra meninggalkan ruang sidang usai mengikuti sidang tuntutan atas kasus penggelapan yang dilakukannya.

Era Digital dan AI: Ancaman Nyata bagi Tenaga Kerja



Ir. Aliy Hafiz, S.Kom., M.T.I.

Dosen Bisnis Digital Institut Teknologi Bisnis Dian Cipta Cendikia, Ketua RTIK Bandar Lampung.

HARI Buruh yang setiap tahun diperingati sebagai simbol perjuangan pekerja kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jika dahulu isu utama berkisar pada upah, kesejahteraan, dan ketersediaan lapangan kerja, maka hari ini persoalan tersebut bertambah dimensinya. Di tengah pesatnya transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), masalah baru tenaga kerja justru terletak pada kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan disruptif.

Perubahan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar atau sektor industri modern, tetapi juga mulai terasa di daerah, termasuk Lampung. Pertanyaannya, apakah tenaga kerja kita sudah benar-benar siap menghadapi era digital dan AI?

Perubahan Dunia Kerja di Era Digital dan AI

Transformasi digital telah mengubah cara manusia bekerja secara fundamental. Hampir seluruh sektor pekerjaan kini bersentuhan dengan teknologi, mulai dari pertanian, perdagangan, pendidikan, hingga layanan publik. Kehadiran AI bahkan mempercepat perubahan tersebut melalui otomatisasi berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Pekerjaan pekerjaan administratif, analisis data, hingga layanan pelanggan atau bahkan layanan publik pun kini mulai digantikan oleh sistem berbasis AI seperti chatbot berbasis AI. Di sisi lain, muncul jenis pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan yang lebih kompleks, seperti data analyst, cloud engineer, AI engineer, digital marketer, dan berbagai profesi berbasis teknologi digital lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kerja tidak lagi statis. Siapa yang tidak mampu beradaptasi dan bertransformasi akan tertinggal. Dalam konteks ini, ancaman terbesar bagi tenaga kerja bukanlah hilangnya pekerjaan, melainkan ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan tersebut.

Kesenjangan Keterampilan yang Semakin Nyata Salah satu persoalan utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah kesenjangan keterampilan atau skill gap. Berdasarkan hasil survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, meskipun terjadi peningkatan

an skor nasional dari 43,34 menjadi 44,53, namun masih terdapat berbagai tantangan mendasar dalam kesiapan sumber daya manusia digital.

Survei IMDI menunjukkan bahwa perkembangan digital masyarakat Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan keterampilan yang memadai. Di satu sisi, penggunaan teknologi seperti e-commerce dan layanan keuangan digital mengalami pertumbuhan signifikan. Namun di sisi lain, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kapasitas, seperti pembelajaran daring dan layanan publik digital, masih relatif rendah.

Lebih jauh lagi, terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan industri terhadap keterampilan digital dengan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak diikuti oleh peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga menciptakan kesenjangan antara permintaan dan penawaran di pasar kerja.

Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan tenaga kerja di era digital bukan sekadar kuantitas, melainkan kualitas. Banyak tenaga kerja tersedia, tetapi tidak semuanya relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Realita Tenaga Kerja di Lampung

Jika dilihat pada tingkat daerah, tantangan ini menjadi lebih nyata. Hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 menunjukkan masih adanya disparitas atau kesenjangan digital antar wilayah di Indonesia. Tidak semua daerah memiliki tingkat kesiapan yang sama, baik dari sisi infrastruktur, literasi digital, maupun pemanfaatan teknologi.

Secara nasional, nilai IMDI Indonesia berada pada angka 44,53, yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan masyarakat digital masih berada pada kategori menengah dan belum optimal dalam mendukung aktivitas produktif.

Dalam konteks di wilayah khusus Provinsi Lampung, nilai IMDI tahun 2025 tercatat sebesar 50,36, sedikit di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum akses dan infrastruktur digital di Lampung sudah relatif berkembang. Pilar infrastruktur bahkan mencapai 57,42 dan literasi digital 53,29, yang menandakan bahwa fondasi digital masyarakat sudah cukup baik.

Namun demikian, persoalan utama justru terlihat pada aspek pemanfaatan dan kesiapan tenaga kerja. Pilar pemberdayaan digital di Lampung hanya berada pada angka 47,02, sementara pilar pekerjaan bahkan lebih rendah, yaitu 41,90. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sudah memiliki akses dan kemampuan dasar digital, pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dan kesiapan kerja masih belum optimal. Tentu ini menjadi catatan penting bagi semua pihak terutama pemerintah daerah dan pusat.

Di Lampung, kondisi ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari perspektif pendidikan, masih banyak lulusan yang secara teoritis memahami teknologi, tetapi belum memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dunia industri di daerah pun menghadapi kesulitan dalam mencari tenaga kerja yang siap pakai, terutama

dalam bidang digital.

Di sisi lain, masyarakat secara umum sebenarnya sudah cukup familiar dengan teknologi. Tingginya penggunaan perangkat digital seperti smartphone dan media sosial menunjukkan bahwa akses bukan lagi menjadi masalah utama. Namun, sebagaimana tergambar dalam IMDI, pemanfaatan teknologi di masyarakat masih didominasi aktivitas konsumtif, sementara penggunaan untuk pembelajaran dan peningkatan kapasitas masih relatif rendah.

Sebagai daerah yang sedang berkembang, Lampung memiliki potensi besar dalam ekonomi digital. Namun tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai, potensi tersebut justru berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal. Jika kesenjangan keterampilan ini tidak segera diatasi, maka tenaga kerja lokal akan semakin tertinggal dalam persaingan, bahkan di wilayahnya sendiri.

Strategi Peningkatan Kesiapan SDM

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Peningkatan kesiapan tenaga kerja di era digital dan AI tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi.

Pertama, dunia pendidikan perlu melakukan penyesuaian kurikulum agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Pembelajaran diperkuat dengan praktik, proyek nyata, serta penguasaan keterampilan digital yang relevan.

Kedua, pelatihan keterampilan digital harus diperluas dan difokuskan pada kebutuhan nyata di lapangan. Program pelatihan yang bersifat umum perlu diarahkan menjadi lebih spesifik, seperti pengolahan data, pemasaran digital, penggunaan aplikasi produktivitas, hingga pemanfaatan AI dalam pekerjaan dan lain-lain.

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas menjadi kunci. Pengembangan sumber daya manusia digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu adanya sinergi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Keempat, masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk terus belajar dan beradaptasi. Di era digital, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas, melainkan dapat dilakukan secara mandiri melalui berbagai platform digital yang tersedia.

Penutup

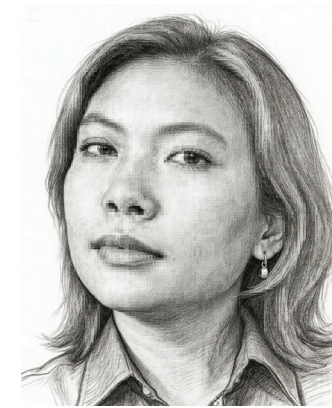
Perubahan zaman tidak bisa dihindari. Era digital dan AI akan terus berkembang dan membawa dampak yang semakin luas terhadap dunia kerja. Dalam kondisi ini, yang bertahan bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Pekerja maupun calon tenaga kerja dituntut untuk memahami keterampilan digital yang relevan, baik untuk kebutuhan saat ini maupun di masa depan. Pemahaman tersebut menjadi kunci penting dalam proses pencocokan antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. Tanpa itu, kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan industri akan semakin melebar. ■

NUANSA

Investasi

MEMASUKI usia 40 tahun sering disebut sebagai fase kematangan hidup.



Delima Natalia Napitupulu

Wartawan Lampung Post

Karier mulai stabil, keluarga kian mapan, dan pengalaman hidup semakin kaya. Namun di balik itu, ada satu hal yang kerap luput dari perhatian: kesehatan. Padahal, justru pada usia inilah tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan fungsi yang tidak bisa diabaikan.

Secara medis, usia 40 merupakan titik penting karena berbagai risiko penyakit mulai meningkat. Penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, diabetes, dan hipertensi menjadi ancaman utama. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kelompok

usia di atas 40 tahun memiliki risiko tinggi akibat akumulasi gaya hidup tidak sehat selama bertahun-tahun. Ini berarti, apa yang kita lakukan di usia 20 dan 30-an akan "ditagih" pada dekade berikutnya.

Salah satu perhatian utama adalah kesehatan jantung. Data di Indonesia menunjukkan bahwa penyakit jantung masih menjadi penyebab kematian utama, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia sekitar 40-45 tahun. Fakta ini menjadi alarm keras bahwa menjaga kesehatan tidak bisa lagi bersifat reaktif, melainkan harus proaktif. Pemeriksaan rutin seperti cek tekanan darah, kolesterol, hingga rekam jantung bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan.

Selain itu, perubahan fisiologis juga mulai terasa. Metabolisme tubuh melambat, sehingga berat badan lebih mudah naik dan lebih sulit diturunkan. Kadar hormon mengalami fluktuasi, memengaruhi energi, suasana hati, hingga kualitas tidur. Tidak sedikit orang di usia ini mulai mengeluhkan mudah lelah atau mengalami penurunan stamina. Kondisi ini bukan sekadar "faktor usia", tetapi sinyal bahwa tubuh membutuhkan perhatian lebih serius.

Risiko gangguan kesehatan lain juga meningkat, mulai dari masalah kardiovaskular, penurunan fungsi organ, hingga gangguan hormonal, khususnya pada perempuan yang memasuki masa perimenopause. Meski tidak semua orang akan mengalami kondisi yang sama, kecenderungan ini cukup kuat untuk menjadi dasar perubahan gaya hidup.

Di sinilah pentingnya kesadaran dan edukasi kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menekankan bahwa pemanfaatan data kesehatan dan pemeriksaan rutin sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat bagi masyarakat. Artinya, semakin dini seseorang mengetahui kondisi kesehatannya, semakin besar peluang untuk mencegah penyakit yang lebih serius.

Menjaga kesehatan di usia 40 bukan berarti harus menjalani hidup yang serba terbatas. Sebaliknya, ini adalah momentum untuk mengatur ulang prioritas. Pola makan seimbang, aktivitas fisik teratur, manajemen stres, serta tidur yang cukup menjadi fondasi utama. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki 30 menit setiap hari, mengurangi konsumsi gula dan lemak jenuh, serta rutin memeriksakan kesehatan dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang.

Lebih dari itu, kesehatan mental juga tidak boleh diabaikan. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga kekhawatiran finansial sering mencapai puncaknya di usia ini. Jika tidak dikelola dengan baik, stres kronis dapat memicu berbagai penyakit fisik.

Pada akhirnya, usia 40 bukanlah awal dari penurunan, melainkan titik balik untuk hidup lebih sadar. Kesehatan bukan sekadar bebas dari penyakit, tetapi kemampuan untuk menjalani hidup secara produktif dan berkualitas. Menjaganya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang bergantung pada kita.

Karena sejatinya, hidup yang panjang tidak berarti tanpa kualitas. Dan kualitas itu dimulai dari keputusan sederhana hari ini: peduli pada kesehatan, sebelum terlambat. ■

Silakan tanggapi melalui Lampungpost.id atau Berhad Tajuk di Metro TV Lampung setiap Selasa dan Jumat, pukul 13.30 WIB

PAK DE - PAK HO



POJOK

WFH dan WFA jadi alternatif tetap produktif meski efisiensi

Bagi rakyat, yang penting tetap terlayani walau sistem berubah

Pemerintah janjin tidak ada pemecatan P3K karena efisiensi yang dilakukan

Memang mencari Solusi yang bisa melegakan, bukan menakuti rakyat...

Undangan

Redaksi mengundang dosen, akademisi, praktisi, dan kalangan masyarakat umum untuk memberi ide/gagasan melalui artikel/ tulisan opini untuk ditayangkan melalui email redaksi@lampost.co sebanyak 6.000 --- 8.000 karakter. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi +62 81218114344 (M Ja'far). Terimakasih

■ TIM REDAKSI

(Sambungan Halaman 1)

Ketika Harga Plastik Mahal, Shrinkflation Menjadi Jalan Pintas Industri

Dr. Antoni Ludfi Arifi, S.E., M.M.

Associate Professor Institut STIAM I & Pemerhati perlindungan Konsumen

MASALAHNYA, strategi ini semakin efektif ketika konsumen tidak memperhatikan detail ukuran. Kelompok konsumen yang "tidak sadar" menjadi sasaran empuk, sehingga perusahaan dapat mempertahankan keuntungan tanpa resistensi pasar. Bahkan, semakin tinggi tingkat ketidaksadaran konsumen, semakin besar ruang bagi praktik shrinkflation untuk berkembang dan semakin signifikan pula dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

Di sisi lain, produsen sering membungkus shrinkflation sebagai upaya menjaga kualitas atau keberlanjutan. Mereka menekankan bahwa pengurangan ukuran dilakukan untuk menghindari kenaikan harga drastis. Namun, tanpa transparansi, narasi ini berpotensi menjadi manipulatif. Dampaknya tidak merata. Kelompok berpendapatan rendah paling dirugikan karena mereka membeli produk dalam frekuensi tinggi dan sangat sensitif terhadap nilai per unit. Ketika isi berkurang, mereka harus membeli lebih sering, yang pada akhirnya meningkatkan pengeluaran total mereka tanpa disertai peningkatan daya beli.

Solusi Nyata: Dari Regulasi hingga Inovasi Industri

Masalah shrinkflation tidak bisa diselesaikan dengan retorika moral semata. Dibutuhkan

langkah konkret yang sistematis dan kolaboratif. Pertama, regulasi transparansi harus diperkuat. Pemerintah perlu mewajibkan pencantuman harga per unit secara jelas pada setiap produk. Langkah ini penting karena transparansi harga per unit terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan konsumen sekaligus menekan praktik manipulatif di pasar yang merugikan masyarakat luas.

Kedua, pelaku industri harus beralih dari strategi defensif ke inovasi produktif. Alih-alih mengurangi ukuran, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi produksi, menggunakan material alternatif, atau mengembangkan kemasan ramah lingkungan yang lebih murah. Pendekatan ini tidak hanya menjadi solusi ekonomi jangka pendek, tetapi juga membuka peluang transformasi menuju industri yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tengah dinamika global.

Ketiga, komunikasi yang jujur menjadi kunci. Transparansi justru dapat meningkatkan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Konsumen lebih menghargai kejujuran dibanding manipulasi terselubung. Dalam konteks ini, perusahaan harus berani menjelaskan alasan perubahan produk secara terbuka sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional.

Keempat, edukasi konsumen harus diperkuat. Literasi ekonomi sederhana seperti memahami

harga per gram atau per liter dapat menjadi senjata ampuh melawan shrinkflation. Konsumen yang cerdas akan memaksa pasar menjadi lebih adil melalui pilihan konsumsi yang rasional.

Kelima, kolaborasi lintas sektor diperlukan. Pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi perlindungan konsumen harus bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem yang transparan dan adil. Tanpa kolaborasi, shrinkflation akan terus menjadi praktik "abu-abu" yang sulit dikendalikan dan berpotensi merugikan secara sistemik.

Akhirnya, krisis harga plastik seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan justru alasan untuk praktik yang merugikan konsumen. Dunia usaha harus memilih: mempertahankan keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan kepercayaan, atau membangun keunggulan jangka panjang melalui transparansi dan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Shrinkflation bukan sekadar strategi bisnis—ia adalah cermin dari integritas ekonomi kita. Dan apabila praktik ini terus dibiarkan tanpa koreksi, maka yang tergerus bukan hanya daya beli, melainkan juga fondasi kepercayaan yang menjadi inti dari pasar yang sehat. "Ketika ukuran diperkecil diam-diam dan harga dibiarkan tetap, yang sebenarnya menyusut bukan hanya isi produk—melainkan kejujuran pasar itu sendiri.."

TAJUK

MBG Picu Konsumsi Pemerintah

PEREKONOMIAN Provinsi Lampung pada triwulan I-2026 mencatatkan capaian yang patut dicermati. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,58 persen secara tahunan, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menempatkan Lampung sebagai salah satu daerah dengan kinerja ekonomi terbaik di Sumatera. Di tengah ketidakpastian global, capaian tersebut memberi sinyal bahwa mesin ekonomi daerah kembali bergerak dengan tenaga yang cukup kuat.

Namun, di balik angka tahunan yang impresif itu, terdapat dinamika lain yang tak bisa diabaikan. Secara triwulanan, ekonomi Lampung justru mengalami kontraksi sebesar 1,08 persen dibandingkan akhir 2025. Meski dianggap sebagai pola musiman, kondisi ini tetap menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya merata sepanjang waktu, dan masih rentan terhadap fluktuasi jangka pendek.

Jika ditelusuri lebih jauh, struktur ekonomi Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian yang menyumbang lebih dari seperempat total PDRB. Sektor ini tumbuh hampir 10 persen, menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Di sisi lain, sektor perdagangan dan industri pengolahan juga bergerak positif, meski belum sepenuhnya menjadi penggerak utama. Yang menarik, sektor akomodasi dan makan minum justru mencatat pertumbuhan tertinggi, menandakan adanya lonjakan aktivitas konsumsi masyarakat.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pola serupa juga terlihat di berbagai daerah, di mana konsumsi—baik rumah tangga maupun pemerintah—menjadi penopang utama pertumbuhan. Bahkan, kontribusi konsumsi rumah tangga di Lampung mencapai lebih dari 64 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi hingga 13,84 persen. Ini menunjukkan bahwa dorongan belanja, terutama dari pemerintah, memainkan peran krusial dalam menjaga ritme ekonomi.

Lonjakan konsumsi pemerintah yang dipicu oleh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi, namun sekaligus harus dikawal secara serius agar tidak berhenti sebagai stimulus jangka pendek semata.

Program MBG terbukti memberi efek berganda terhadap perekonomian. Tidak hanya meningkatkan aktivitas sektor jasa makanan dan minuman, tetapi juga menggerakkan rantai pasok dari hulu ke hilir. Permintaan bahan pangan meningkat, pelaku UMKM mendapatkan ruang tumbuh, dan perputaran uang di tingkat lokal menjadi lebih hidup. Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program sosial, melainkan juga instrumen ekonomi yang efektif.

Meski demikian, ketertinggalan berlebihan pada konsumsi pemerintah menyimpan risiko tersendiri. Pertumbuhan yang terlalu ditopang oleh belanja negara berpotensi kehilangan daya dorong ketika intervensi tersebut berakhir. Tanpa penguatan sektor produktif lain, seperti industri pengolahan dan investasi berbasis nilai tambah, ekonomi daerah bisa kembali melambat.

Tantangan lainnya terletak pada kualitas ketenagakerjaan. Meski tingkat pengangguran terbuka menurun, masih banyak pekerja yang berada dalam kategori setengah menganggur atau bekerja tidak penuh. Ini menandakan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya berkualitas dan belum mampu menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan.

Di sisi demografi, Lampung juga mulai menghadapi fase populasi menua. Dengan proporsi lansia yang terus meningkat, kebutuhan terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial akan semakin besar. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini bisa menjadi beban tambahan bagi perekonomian di masa depan.

Karena itu, langkah ke depan tidak cukup hanya menjaga konsumsi tetap tinggi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa momentum yang dihasilkan dari MBG dapat ditransformasikan menjadi penguatan sektor-sektor produktif. Investasi harus diarahkan pada industri yang mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah. Sementara itu, sektor pertanian perlu terus didorong agar tidak hanya menjadi penopang, tetapi juga penggerak utama yang lebih modern dan efisien. ■

Poin Penting;

1. Kepala desa berperan sebagai motor perubahan.
2. Kolaborasi pemerintah dan desa menjadi kunci pembangunan.
3. Potensi desa perlu dioptimalkan sebagai kekuatan ekonomi.

Kepala desa diharapkan mampu menjadi motor perubahan yang mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. berkelanjutan.

DELIMA NATALIA NAPITUPULU
delima@lampungpost.co.id

GUBERNUR Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyoroti beragam persoalan desa yang masih menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai tantangan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia.

Dalam pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Lampung di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5), Gubernur menegaskan desa masih menghadapi tekanan serius. Harga komoditas pertanian yang rendah serta biaya produksi yang tinggi menjadi beban utama petani.

Kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan meningkatkan pendapatan. Mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tanpa ruang untuk investasi pendidikan maupun usaha produktif. Situasi itu kemudian memicu efek berantai pada sektor lain.

Gubernur mengungkapkan keterba-



PELANTIKAN. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, saat pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih Lampung di Balai Keraton Kantor Gubernur, Selasa (5/5). Kepala desa yang memiliki peran strategis harus mampu membaca potensi lokal dan mengelolanya menjadi kekuatan ekonomi.

atasan ekonomi berdampak langsung pada akses pendidikan masyarakat desa. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia belum berkembang optimal. Ia menyoroti posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang masih tertinggal secara nasional. "IPM kita berada di peringkat 26 secara nasional," ujarnya.

Posisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang perlu segera ditangani. Tanpa intervensi yang tepat, Lampung berpotensi tertinggal lebih jauh dari daerah lain.

Selain aspek ekonomi dan pendidikan, Gubernur juga menyoroti dampak sosial yang muncul. Tekanan ekonomi mendorong peningkatan jumlah pekerja migran. Kondisi itu sering memicu persoalan keluarga, termasuk ketidakharmonisan rumah tangga.

Ia menilai masalah tersebut tidak bisa dipisahkan dari kondisi desa. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus berfokus pada penguatan ekonomi desa sebagai fondasi utama.

Dalam konteks tersebut, Gubernur menekankan peran strategis kepala desa. Ia menyebut kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Posisi ini menuntut kepemimpinan

yang adaptif dan inovatif.

Menurutnya, kepala desa tidak cukup hanya menjalankan administrasi. Mereka harus mampu membaca potensi lokal dan mengelolanya menjadi kekuatan ekonomi. Pendekatan itu penting untuk menciptakan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang menjadi teladan. Kepala desa harus menghadirkan solusi konkret atas permasalahan masyarakat. Setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan warga, bukan sekadar formalitas.

"Kepala desa harus menjadi *role model*, mampu menghadirkan solusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil," ujarnya.

Perkuat Kolaborasi

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengajak seluruh anggota Apdesi untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi antara pemerintah daerah dan desa dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan. Tanpa kerja sama yang solid, program pembangunan sulit mencapai hasil maksimal.

Ajakan tersebut sekaligus menjadi do-

rongan untuk mengoptimalkan potensi desa. Banyak sumber daya lokal yang belum tergarap secara maksimal. Jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Arah kebijakan itu menunjukkan pergeseran fokus pembangunan. Pemerintah mulai menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pendekatan itu sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan.

Namun, implementasi di lapangan menjadi tantangan utama. Banyak desa masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan akses teknologi. Oleh karena itu, pendampingan dan pelatihan bagi aparat desa menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat. Pengelolaan anggaran desa yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga membuka peluang investasi dan kerja sama yang lebih luas.

Peran generasi muda desa juga perlu diperhatikan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan dapat membawa inovasi baru. Dengan demikian, desa tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. (MG-INTAN/R3)

Bandar Lampung Berpotensi Jadi Percontohan Posbankum

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung mempercepat penguatan layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan. Langkah tersebut mengemuka setelah Wali Kota Eva Dwiana menerima audiensi jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung, Selasa (5/5).

Pertemuan tersebut membahas penguatan dan pembinaan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh kelurahan. Selain itu, audiensi menjadi forum strategis untuk menyelenggarakan program pusat dan daerah dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Rombongan Kanwil Kementerian Hukum Republik Indonesia dipimpin Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrah-

man. Ia menilai langkah Pemkot Bandar Lampung menunjukkan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pendampingan hukum.

Selanjutnya, Eva Dwiana menegaskan peran penting camat dan lurah dalam mendukung operasional posbankum. Ia meminta aparat wilayah tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga aktif menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat.

Menurutnya, keberadaan posbankum harus benar-benar dirasakan warga. Oleh karena itu, Pemkot akan menyiapkan pelatihan paralegal bagi aparat kelurahan. Program tersebut bertujuan meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan hukum dasar.

"Dengan adanya posbankum, masyarakat tidak perlu bingung menghadapi persoalan hukum. Warga bisa datang ke kelurahan untuk berkonsultasi dan mendapatkan pendampingan secara gratis," ujar Eva.

Selain itu, Pemkot menargetkan seluruh kelurahan di Bandar Lampung memiliki posbankum yang aktif. Saat ini, terdapat 126 kelurahan yang menjadi sasaran penguatan layanan tersebut. Pemerintah berharap setiap unit dapat berfungsi optimal dan mudah diakses warga.

Di sisi lain, Taufiqurrahman mengapresiasi komitmen Pem-

kot. Ia bahkan menilai Bandar Lampung berpotensi menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan posbankum di tingkat kelurahan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan Kecamatan menjadi faktor kunci keberhasilan. Tanpa koordinasi yang kuat, program layanan hukum berisiko tidak berjalan maksimal.

Dia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program. Posbankum tidak hanya hadir sebagai simbol layanan, tetapi harus mampu memberikan solusi konkret bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Penguatan posbankum menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keadilan.

Banyak masyarakat masih menghadapi keterbatasan pengetahuan hukum. Kondisi itu sering membuat mereka kesulitan menyelesaikan persoalan secara tepat.

Dengan adanya posbankum, kesenjangan tersebut dapat diperkecil. Warga memperoleh ruang konsultasi yang mudah dijangkau. Selain itu, pendampingan hukum gratis membantu masyarakat menghindari biaya tinggi dalam proses hukum.

Namun, tantangan tetap ada. Sosialisasi yang belum merata berpotensi menghambat pemanfaatan layanan. Selain itu, keterbatasan tenaga terlatih dapat memengaruhi kualitas pelayanan di lapangan. (RIC/R3)



PEMBERITAHUAN. Sehubungan dengan diterimanya sertifikat verifikasi harian umum Lampung Post dari Dewan Pers Nomor 111/DP-Terverifikasi/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, kepada seluruh relasi dan narasumber agar tidak melayani wartawan Lampung Post selain yang tertera dalam boks redaksi atau surat tugas resmi dari redaksi. Apabila ada nama lain yang mengaku sebagai wartawan harian ini, segera melapor via SMS/WA ke nomor 08154059000.

LAMPUNG POST

Direktur Utama: Rahmadi Heru
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Abdul Gafur
Pemimpin Perusahaan: Iskandar Zulkarnain

Dewan Redaksi Media Group:
Ketua: Elman Saragih (merangkap anggota)
Wakil Ketua: Arief Suditomo (merangkap anggota)
Anggota: Mohammad Mirdal Akib, Abdul Kohar, Gaudensius Suhardi, Budiyo, Iskandar Zulkarnain, Ade Alawi, Kania Sutisnawinata
Dewan Pengarah: Lestari Moerdijat, Saur M. Hutabarat, Adrianto Machribe

Kepala Divisi Pemberitaan: Must'an Basran
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Muharram Candra Luginia

Manajer IT & SEO: Agung Harikresna
Sekretaris Redaksi: Nana Nurhasanah

Redaktur: Delima Natalia Napitupulu, Isnovan Djamiludin, Ricky Penataria Marli, Wandi Barboy Silaban.

Asisten Redaktur: Deni Zulniyadi, Efran Kurniawan, Nur Jannah, Triyadi Isworo

Liputan Bandar Lampung: Andi Apriyadi, Asrul Septian Malik, Atika Oktaria SN, Umar Robani

Digital Broadcasting: Hendrivan Gumala (Redaktur), Arumsyah, Afizah, M. Rifqi Mundayin, Widy CS

Desain Grafis: Putra Alam Aprilandi
Ilustrator: Putra Alam Aprilandi

Kepala Divisi Revenue: Sri Agustina
Kepala Divisi Supporting: Supraptiningsih
Account Manager: Merry Destaria, Dat Suranta Ginting, Setiaji Bintang Pamungkas
Senior Manajer Keuangan: Ikbal Yasin
Manajer Umum & Percetakan: Junianto
Manajer Aktivasi: Wiji Sukanto

Kepala Biro: Mat Saleh (Lampung Barat, Way Kanan Pesisir Barat); Merwan (Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji); Rianto (Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur); Adi Sunaryo (Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus); Herwansyah (Lampung Selatan) (Non Organik)

Marketing Digital Biro: Candra Putra Wijaya (Way Kanan), Eliyah, Salda Andala (Lampung Barat), Fajar Nofitra (Lampung Utara), Yon Fisoma (Pesisir Barat), Bambang Pamungkas (Metro), Arman Suhada (Lampung Timur), Tedjo Waluyo, Raiza Handanni Agustira (Lampung Tengah), Ferdi Irwanda (Tulangbawang Barat), Ridwan Anas (Mesuji), Putra Pancasila Sakti (Pesawaran), Rusdy Senapal (Tanggamus), Yudi Prayoga (Pringsewu)

Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Hajimena, Lampung Selatan, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). <http://www.lampungpost.co> e-mail: redaksi@lampungpost.co.id, redaksilampungpost@yahoo.com.

Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113

Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986.

Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Hajimena, Lampung Selatan Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp5.000. Langganan per bulan Rp120.000 (luar kota + ongkos kirim). Langganan Lampung Post Digital Rp50.000.

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN LAMPUNG POST MULTIPLATFORM (METRO TV LAMPUNG, LAMPOST.CO, LAMPUNGPOST.ID, RADIO SAI 100FM, SERTA MEDIA SOSIAL DILINGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

Teror Harimau Resahkan Warga Lemong

Poin Penting:

1. Tujuh kambing ditemukan mati dalam sepekan.
2. Jejak diduga harimau ditemukan di lokasi kejadian.
3. Warga mulai membatasi aktivitas di kebun.

Kasus dugaan serangan harimau di Lemong menunjukkan meningkatnya potensi konflik manusia dan satwa liar.

SALDA ANDALA
salda@lampungpost.co.id

WARGA Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, digegerkan kematian tujuh ekor kambing yang diduga akibat serangan harimau sumatra. Peristiwa ini terjadi di Pekon Malaya dan berlangsung dalam rentang waktu sepekan terakhir.

Penemuan pertama terjadi pada 27 April 2026. Selanjutnya, warga kembali menemukan bangkai kambing pada 30 April 2026 di lokasi yang tidak jauh dari kandang ternak. Pola kejadian yang berulang itu langsung memicu kekhawatiran masyarakat.

Seorang warga, Adi, menjelaskan kondisi bangkai menunjukkan ciri serangan satwa buas. Selain itu, warga menemukan jejak kaki yang diduga milik harimau di sekitar lokasi. Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya predator liar di kawasan itu. "Selain itu, ditemukan sisa tulang kaki kambing yang berjarak sekitar 30 meter dari kandang," ujarnya, Selasa (5/5).

Pola itu menunjukkan hewan predator membawa mangsanya menjauh sebelum mengonsumsinya. Perilaku tersebut identik dengan karakter harimau di alam liar.

Akibat kejadian ini, warga mulai membatasi aktivitas di kebun. Mereka menghindari bekerja sendiri, terutama pada pagi dan sore hari. Rasa waspada meningkat karena lokasi kejadian berada dekat area aktivitas sehari-hari.

Selain itu, warga meminta aparat segera melakukan peninjauan. Mereka berharap pihak berwenang dapat memastikan jenis satwa yang menyerang dan mengambil langkah pengamanan. Permintaan ini muncul karena warga khawatir



JEJAK HARIMAU. Anggota Bhabinkamtibmas dan Pohut menunjukkan jejak kaki harimau saat melacak keberadaan bintang buas tersebut. Warga Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, digegerkan kematian tujuh ekor kambing yang diduga akibat serangan harimau sumatra dalam rentang waktu sepekan terakhir.

ancaman dapat meluas.

"Kami takut jadinya di sini. Minta Polhut atau pihak terkait untuk memeriksa apakah harimau atau bukan," katanya.

Menanggapi situasi tersebut, aparat gabungan langsung turun ke lapangan. Tim terdiri dari kepolisian, pemerintah kecamatan, polisi hutan, Satgas WCS, Babinsa, Satpol PP, BPBD, serta masyarakat telah mengambil langkah antisipasi pemeriksaan di sekitar kandang ternak dan area kebun HPT.

Kapolsek Pesisir Utara, Imam Sanuwani, menyatakan pihaknya telah mengambil langkah antisipasi. Aparat memberikan imbauan kepada warga, melakukan patroli gabungan, serta memeriksa lokasi temuan.

Ia menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat. Warga diminta sementara menghindari aktivitas di area yang diduga menjadi jalur pergerakan satwa. Selain itu, patroli rutin terus dilakukan untuk menjaga rasa aman.

Jangan Bertindak Sendiri

Imam juga mengingatkan warga agar tidak bertindak sendiri. Ia meminta masyarakat segera melapor jika menemukan tanda keberadaan satwa liar. Langkah itu penting untuk mencegah risiko yang lebih besar.

Sebab, kejadian di Lemong bukan kasus pertama di wilayah Lampung. Sebelumnya, serangan harimau juga terjadi di wilayah Sekincau pada September 2025. Seorang pet-

ani bernama Amir mengalami luka serius akibat serangan tersebut.

Saat itu, harimau menyerang dari belakang ketika korban melintas di jalur hutan. Korban berhasil selamat setelah mendapat pertolongan medis, meski mengalami luka cukup parah. Kasus tersebut menunjukkan potensi konflik manusia dan satwa masih tinggi.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, aparat bersama instansi terkait terus memetakan wilayah rawan. Mereka memasang kamera pemantau dan menyiapkan perangkat di titik tertentu. Langkah itu bertujuan memantau pergerakan satwa liar.

Kemunculan harimau di sekitar permukiman sering berkaitan

dengan perubahan habitat. Penyempitan hutan dan berkurangnya mangsa alami mendorong satwa keluar dari wilayahnya. Kondisi itu meningkatkan potensi konflik dengan manusia.

Selain itu, aktivitas manusia yang semakin dekat dengan kawasan hutan juga memperbesar risiko. Oleh karena itu, pendekatan penanganan harus mencakup aspek keamanan dan konservasi.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama menjaga keseimbangan ekosistem. Edukasi tentang mitigasi konflik satwa menjadi langkah penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengurangi risiko tanpa merusak habitat satwa. (R3)

Bendungan Renggut Nyawa Pencari Ikan

SEORANG warga Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di kawasan Bendungan Way Rarem. Korban diketahui bernama Sodri (46), yang sehari-hari beraktivitas sebagai pencari ikan.

Peristiwa ini bermula saat korban dilaporkan hilang pada 4 Mei 2026. Keluarga dan warga setempat segera melakukan pencarian di sekitar lokasi bendungan. Upaya tersebut kemudian melibatkan aparat kepolisian dan tim penyelamat.

Selanjutnya, tim gabungan yang terdiri dari Polsek Abung Tengah, Polsek Abung Barat, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan turun ke lapangan. Mereka menyisir area perairan dan tepian bendungan secara intensif.

Setelah dua hari pencarian, tim akhirnya menemukan jasad korban pada Rabu (6/5). Lokasi penemuan berada di bagian atas bendungan, tepatnya di wilayah Desa Kedaton, Kecamatan Abung Tengah.

Kapolsek Abung Tengah, Abdul Majib, menjelaskan tim bergerak cepat setelah menerima laporan. Ia menegaskan koordinasi antarinstansi berjalan lancar selama

proses pencarian.

"Begitu menerima laporan, kami langsung turun melakukan evakuasi bersama tim. Pencarian terus berlanjut hingga korban ditemukan," ujarnya.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat penyakit kram. Kondisi tersebut diduga menjadi penyebab utama insiden tragis ini. Meski korban diketahui mampu berenang, serangan kram dapat menghambat kemampuan bertahan di air.

Selain itu, tim menemukan sejumlah barang di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya ikan hasil tangkapan dan pelampung yang digunakan korban. Temuan itu memperkuat dugaan korban tenggelam saat mencari ikan.

Menurut warga, korban sempat terlihat berada di sekitar bendungan sebelum kejadian. Namun, tidak lama kemudian ia menghilang dan tidak kembali ke rumah.

Selanjutnya, aparat melakukan evakuasi jasad korban dengan pengawalan ketat. Proses itu juga melibatkan pemerintah kecamatan setempat. Petugas kemudian merencanakan pemeriksaan luar untuk memastikan tidak ada tanda

kekerasan.

"Kami akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi korban. Langkah ini penting agar penyebab kematian dapat dipastikan," kata Abdul Majib.

Kejadian itu menunjukkan tingginya risiko aktivitas di perairan terbuka. Meski terlihat aman, kondisi fisik seperti kram dapat menjadi faktor fatal. Oleh karena itu, kewaspadaan menjadi hal utama saat beraktivitas di area berbahaya.

Selain itu, penggunaan alat keselamatan seperti pelampung belum tentu cukup. Masyarakat perlu memahami batas kemampuan fisik masing-masing. Aktivitas di air sebaiknya dilakukan bersama rekan untuk meminimalkan risiko.

Peran cepat aparat dan tim penyelamat juga menjadi faktor penting dalam penanganan kasus ini. Koordinasi yang baik mempercepat proses pencarian meski hasilnya tidak sesuai harapan.

Kejadian itu juga sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat sekitar bendungan. Aktivitas mencari ikan harus memperhatikan faktor keselamatan, terutama kondisi kesehatan pribadi. (FIT/R3)



PENCARIAN KORBAN. Warga bersama aparat saat melaksanakan pencarian orang hilang diduga mencari ikan di Bendungan Way Rarem. Setelah dua hari pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Rabu (6/5).

Lampung Kejar Peningkatan Mutu Pendidikan

Poin Penting:

1. Pemkot dan Disdikbud berkomitmen memperbaiki pendidikan.
2. Infrastruktur dan mutu pembelajaran menjadi prioritas.
3. Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda terus dikembangkan.

Aksi mahasiswa menjadi katalis percepatan reformasi pendidikan di Lampung dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung, provinsi, dan DPRD menunjukkan komitmen kuat melakukan perbaikan.

TRİYADI ISWORO

triyadi@lampungpost.co.id

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung menegaskan komitmen memperbaiki kualitas pendidikan. Langkah itu muncul setelah gelombang kritik mahasiswa yang menyoroti kondisi pendidikan di daerah.

Aksi yang digelar Aliansi Lampung Melawan di kantor DPRD PLampung, Selasa (5/5), menjadi titik tekan perubahan. Mahasiswa membawa isu Pendidikan suram, Lampung tenggelam sebagai refleksi kegelisahan terhadap mutu pendidikan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedy Amarullah, menyatakan pemerintah membuka ruang dialog. Ia menegaskan seluruh aspirasi mahasiswa akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret.

Selain itu, pemerintah kota menilai kritik mahasiswa sebagai bagian penting dalam mempercepat reformasi. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor akan diperkuat agar kebijakan berjalan efektif.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wilson Faisol, menambahkan tuntutan mahasiswa akan segera dibahas bersama pihak terkait. Ia memastikan setiap aspirasi menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Di tingkat provinsi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, menyampaikan komitmen serupa. Ia menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan aksi dengan program perbaikan berkelanjutan.

Thomas menyebut perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas utama. Selain itu, peningkatan mutu pembelajaran juga menjadi fokus agar kualitas pendidikan semakin kompetitif.

Selanjutnya, pemerintah terus menjalankan program strategis pendidikan. Program Sekolah Rakyat telah berjalan di beberapa wilayah seperti Kota Baru, Natar, dan Su-



PEPERBAIKI PENDIDIKAN. Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedy Amarullah (duduk kanan) bersama Kadisdikbud Lampung, Thomas Amirico (duduk, kedua kanan) saat menemui mahasiswa dari Aliansi Lampung Melawan di halaman Kantor DPRD Lampung, Selasa (5/5). Mahasiswa menuntut reformasi pendidikan agar Lampung tidak tenggelam.

kadana. Sementara itu, Sekolah Garuda hadir di Kalianda, Pringsewu, dan Mesuji.

Tidak berhenti di situ, pemerintah mengusulkan lima lokasi baru Sekolah Rakyat. Wilayah tersebut meliputi Lampung Utara, Way Kanan, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Lampung Barat. Langkah itu bertujuan memperluas akses pendidikan.

Selain pengembangan sekolah, pemerintah juga menyoroti kesejahteraan guru. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui berbagai kebijakan, termasuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Kebijakan itu diharapkan meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru. Pemerintah juga melakukan pendataan tenaga pendidik di kabupaten dan kota untuk memastikan

kebijakan berjalan merata.

Kawal Tuntutan

Di sisi lain, DPRD Lampung mengambil peran pengawasan. Ketua Komisi I DPRD, Garinca Reza Pahlevi, menyatakan lembaganya siap mengawal tuntutan mahasiswa.

Ia menilai aspirasi mahasiswa sejalan dengan target pembangunan nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi syarat utama mewujudkan generasi emas 2045.

Garinca menegaskan DPRD akan memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Selain itu, lembaganya akan mengawasi isu penting seperti gaji dan tunjangan guru, baik honorer, PPPK, maupun swasta.

Dia menjelaskan program Sekolah Rakyat

berada di bawah koordinasi Dinas Sosial. Sementara pembangunan fisik melibatkan kementerian terkait. Koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci keberhasilan program.

Ia juga menyinggung polemik Sekolah Siger. Jika proses perizinan tidak terpenuhi, siswa akan dialihkan ke sekolah reguler atau Sekolah Rakyat. Pendekatan ini bertujuan menjaga keberlanjutan pendidikan siswa.

Respons cepat pemerintah dan DPRD menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap pentingnya reformasi pendidikan. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi kebijakan di lapangan.

Selain itu, kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada infrastruktur. Kompetensi guru, kurikulum relevan, serta akses teknologi juga harus diperkuat. (R3)

Pemerintah Perkuat Kepastian Hukum Guru Non-ASN

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong penataan guru non-ASN agar memiliki kepastian hukum dan jalur karier yang jelas. Selain itu, pemerintah membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti seleksi menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan langkah itu menjadi bagian dari transformasi birokrasi pendidikan. Ia menyampaikan kebijakan tersebut saat kunjungan kerja di Kupang, Selasa (5/5).

Menurutnya, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan guru pada 2026 dan tahun berikutnya. Oleh karena itu, penataan guru non-ASN menjadi prioritas utama agar distribusi tenaga pendidik lebih merata.

Ia menilai keberadaan guru non-ASN sangat penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Selama ini, mereka berperan langsung di sekolah yang dikelola pemerintah daerah. Tanpa mereka, proses belajar mengajar berpotensi terganggu.

Selain itu, pemerintah ingin memberikan kepastian status bagi para guru tersebut. Dengan mengikuti seleksi sesuai ketentuan, guru non-ASN berpeluang berubah status menjadi ASN. Perubahan itu membuka akses terhadap hak dan jenjang karier yang lebih jelas.

"Guru non-ASN memiliki kesempatan mengikuti seleksi. Jika lolos, status mereka akan berubah menjadi ASN dengan jalur karier yang lebih berkelanjutan," ujar Mu'ti.

Di sisi lain, pemerintah memastikan proses pembelajaran tetap berjalan normal. Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur keberlanjutan tugas guru non-ASN.

Melalui kebijakan tersebut, guru yang telah terdata dan masih aktif mengajar tetap menjalankan tugas hingga 31 Desember 2026. Dengan demikian, tidak ada kekosongan tenaga pengajar di sekolah selama masa transisi kebijakan.

Selanjutnya, pemerintah menyiapkan langkah strategis pasca-2026. Kementerian akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB serta lembaga terkait untuk membuka formasi guru secara bertahap.

Langkah tersebut bertujuan menyesuaikan kebutuhan tenaga pengajar dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi ketimpangan distribusi guru antardaerah.

Mu'ti menegaskan pembenahan tata kelola menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memastikan jumlah guru sesuai kebutuhan. Selain itu, penempatan guru juga dapat lebih tepat sasaran.

Kebijakan itu menjadi angin segar bagi guru non-ASN. Selama ini, banyak dari mereka menghadapi ketidakpastian status dan keterbatasan kesejahteraan. Dengan peluang menjadi ASN, mereka memperoleh kepastian hukum dan perlindungan lebih baik.

Namun, proses seleksi harus berlangsung transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan formasi baru.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memegang peran penting. Mereka perlu mendata guru secara akurat dan memastikan distribusi tenaga pendidik berjalan efektif. Tanpa data yang valid, kebijakan pusat sulit diimplementasikan secara optimal.

Selain itu, peningkatan kompetensi guru tetap menjadi prioritas. Status ASN tidak otomatis menjamin kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional harus berjalan seiring dengan kebijakan penataan.

Kebijakan itu juga berdampak pada kualitas pendidikan nasional. Dengan tenaga pendidik yang lebih stabil dan terjamin, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih konsisten. Hal tersebut berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. (ANT/R3)



KEPASTIAN GURU NON-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti (kedua dari kanan) saat kunjungan kerja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (5/5). Kemendikdasmen mendorong penataan guru non-ASN agar memiliki kepastian hukum dan jalur karier yang jelas serta membuka peluang mereka mengikuti seleksi menjadi ASN.

Arsenal Pecah Puasa Final



GOL FINAL. Penyerang Arsenal, Bukayo Saka, saat mencetak gol ke gawang Atletico Madrid pada leg kedua semifinal Liga Champions di Emirates Stadium, Rabu (6/5) dini hari WIB. Gol tersebut memastikan The Gunners lolos ke final berkat keunggulan agregat 2-1.

Poin Penting:

1. PSG unggul agregat dari leg pertama.
2. Muenchen wajib mencetak gol cepat.
3. Lini tengah menjadi kunci permainan.

Bayern Muenchen memiliki keuntungan bermain di kandang, sebaliknya meski berada di posisi lebih aman, PSG tetap menghadapi tekanan besar.

RICKY P MARLI
ricky@lampungpost.co.id

ARSENAL memastikan langkah ke final Liga Champions 2025/26 setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Gol tunggal Bukayo Saka di Emirates Stadium, Rabu (6/5) dini hari WIB, menjadi penentu kemenangan pada leg kedua.

Kemenangan itu tidak sekadar memba-

wa Arsenal ke partai puncak. Lebih dari itu, hasil tersebut mengakhiri penantian panjang selama dua dekade. Terakhir kali Arsenal tampil di final terjadi pada 2006, ketika mereka kalah dari Barcelona.

Kini, di bawah arahan Mikel Arteta, Arsenal kembali ke panggung tertinggi Eropa. Arteta berhasil membangun tim yang solid, disiplin, dan efektif sepanjang musim ini.

Secara performa, Arsenal menunjukkan konsistensi luar biasa. Mereka mencatat rekor tak terkalahkan dalam 14 pertandingan Liga Champions musim ini. Rinciannya, 11 kemenangan dan tiga hasil imbang. Catatan tersebut menempatkan Arsenal dalam sejarah kompetisi.

Selain itu, kekuatan lini belakang menjadi fondasi utama. Duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes tampil solid sepanjang musim. Mereka membantu tim mencatat 30 clean sheet di semua kompetisi, capaian terbaik dalam lebih dari tiga dekade.

Di sisi lain, produktivitas tim juga meningkat signifikan. Kemenangan atas Atletico menjadi kemenangan ke-42 Arsenal musim ini. Angka tersebut melampaui rekor lama klub yang tercipta pada musim 1970/71.

Meski demikian, laga tidak lepas dari kontroversi. Atletico sempat mengklaim penalti setelah insiden di kotak terlarang. Namun, wasit tidak mengabulkan protes tersebut. Keputusan ini memicu perdebatan, tetapi tidak mengubah hasil akhir.

Pelatih Atletico, Diego Simeone, memilih tidak menyalahkan wasit. Ia menilai timnya tetap harus menerima hasil

tersebut. Selain itu, ia mengapresiasi perjuangan pemain yang mampu mencapai semifinal.

Simeone menilai timnya telah melampaui ekspektasi. Namun, ia mengakui kegagalan meraih trofi menjadi catatan penting. Atletico harus memperbaiki konsistensi untuk bersaing di level tertinggi.

"Saya tidak akan fokus pada hal itu. Itu hanya akan menjadi alasan, dan saya tidak ingin membuat alasan. Kami sampai di tempat yang tidak dibayangkan siapa pun, bersaing dengan tim dengan kekuatan luar biasa. Saya merasa bangga berada di posisi saya sekarang. Saat pramusim, ketika tim diperkenalkan, saya katakan

Rotary Perkuat Ketahanan Pangan di Lampung Tengah



ORGANISASI kemanusiaan Rotary International kembali memperkuat kontribusinya di Lampung Tengah melalui pembangunan infrastruktur irigasi. Program menyasar Kampung Ramadewa, Kecamatan Seputih Raman, Rabu (6/5), sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas pertanian.

Melalui dukungan Rotary Club Lampung Raden Intan, proyek menghadirkan saluran air sepanjang empat kilometer. Saluran tersebut mengalir lahan yang sebelumnya tidak produktif agar dapat diolah menjadi sawah.

Langkah itu menjadi kelanjutan dari proyek irigasi sebelumnya. Pada periode 2019 hingga 2022, Rotary membangun jaringan irigasi sepanjang 4.110 meter. Infrastruktur tersebut mampu mengairi lebih dari 600 hektare lahan pertanian.

Dampak program tersebut terlihat signifikan. Ratusan kepala keluarga di sejumlah kampung merasakan peningkatan hasil panen. Selain itu, kualitas gabah yang dihasilkan juga mengalami perbaikan.

Pada kegiatan terbaru, jajaran Rotary turut melakukan panen bersama petani. Kegiatan itu menjadi simbol keberhasilan program sekaligus bukti nyata peningkatan produktivitas.

Perwakilan Rotary, Eva Kurniati, menegaskan komitmen organisasi untuk terus mendukung sektor pertanian. Ia menyebut irigasi sebagai faktor kunci dalam keberhasilan budidaya padi.

"Irigasi menjadi syarat utama bagi petani. Tanpa sistem yang baik, tanaman tidak akan tumbuh optimal," ujarnya.

Selain itu, Rotary juga menempatkan program ini sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan. Organisasi tersebut ingin membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

Eva menjelaskan hasil panen meningkat secara signifikan setelah pembangunan irigasi. Dalam satu hektare lahan, petani dapat menghasilkan hingga enam ton gabah. Nilai tersebut mencapai puluhan juta rupiah dalam satu kali panen. (CK2/NATIVE/RIO)

kami akan bersaing. Dan kami bersaing. Sayangnya kami tidak memenangkan apa pun, tetapi kami telah mencapai tempat yang tidak mudah untuk dicapai," kata Simeone.

Hasil Kerja Keras

Sementara itu, Arteta menilai kemenangan ini sebagai hasil kerja keras seluruh elemen klub. Ia menyoroti peran suporter yang menciptakan atmosfer luar biasa di stadion. Dukungan tersebut menjadi energi tambahan bagi para pemain.

"Ini malam yang luar biasa. Kita membuat sejarah lagi bersama-sama. Saya sangat bahagia dan bangga pada semua orang di klub ini. Sambutan yang kami

terima di luar stadion sangat istimewa dan unik," ujarnya.

Arteta juga mengakui sempat menghadapi dilema dalam menentukan susunan pemain. Namun, ia mengandalkan insting dan akhirnya mempertahankan komposisi tim yang sama seperti laga sebelumnya.

Arsenal memiliki peluang besar untuk meraih gelar. Mereka menunjukkan keseimbangan antara lini serang dan pertahanan. Selain itu, kedalaman skuad menjadi keunggulan tambahan.

Namun, tantangan di final tidak akan mudah. Lawan yang dihadapi memiliki kualitas setara. Oleh karena itu, Arsenal harus menjaga konsistensi dan fokus pada detail kecil. (M/R3)

ZITLINE
Internet Service Provider

Connecting Your Life
#WITHZITLINE

Apapun Aktivitas dan Bisnismu Percayakan koneksi internetnya menggunakan ZITLINE

100%
FIBER OPTIC

UNLIMITED
INTERNET
TANPA BATAS QUOTA

100 Mbps

395.000

Maksimal 100Mbps / Per Bulan

*Syarat dan ketentuan berlaku

TELAH TERCOVER DI SELURUH
AREA LAMPUNG

Hubungi Kami
0812 6363 6312

Whatsapp Customer Service

(0721)8050720

@zitline

www.zitline.net.id

oneClick

LAMPUNG POST

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

KREDIT PANTAS

ASN dan PPPK

maksimal mewujudkan impian

Plafond Besar + Proses Cepat + Mudah

Angsuran Ringan + Bunga Bersaing + Dilindungi Asuransi

mau?

www.banklampung.co.id